

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27) bahwa definisi akuntansi adalah:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Adapun pengertian akuntansi menurut Mursyidi (2010:17):

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Berdasarkan pengertian akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi atau proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi yang menghasilkan laporan untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi para pemakainya.

2.1.1.2 Akuntansi Keuangan

Pengertian akuntansi keuangan menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:29):

“Akuntansi keuangan adalah sistem pengakumulasian, pemrosesan, dan pengkomunikasian yang didesain untuk informasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan kredit oleh pemakai eksternal.”

Informasi akuntansi keuangan dikomunikasikan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan dan dibatasi oleh beberapa ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi ($Aset = Liabilitas + Ekuitas$). Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk

menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham.

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1):

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.”

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan suatu susunan daftar atau ringkasan sebagai pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak penilai sebagai yang menilai kinerja perbankan untuk melihat sejauh mana prestasi atau hasil kinerja suatu perusahaan. Hasil kinerja ini dapat digunakan sebagai perbandingan apakah kinerjanya lebih baik atau tidak dengan melihat sisi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik

dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Yang disebut *principal* adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Menurut Eisenhardt dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut

sebagai manusia akan berindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya dalam Haris (2004).

Hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan untuk diselewengkan dan dapat menimbulkan masalah keagenan yang dapat diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer. Manajer memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor dalam Ujiantho (2007).

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelolaan oleh manajemen (*agent*) cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007). *Agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss*. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan prinsipal akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut *residual loss* oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007).

Konflik kepentingan dapat semakin meningkat karena prinsipal tidak dapat selalu memonitor aktivitas manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Terkadang informasi yang disampaikan

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keadaan seperti ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) dalam Haris (2004).

Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen dalam Ujjantho (2007).

Ali dalam Ujjantho dan Pramuka (2007) mengatakan bahwa manajer yang telah diberi wewenang untuk mengelola perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal dan melaporkan tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Atas kinerja manajer tersebut, kompensasi manajemen diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujjantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dibuat manajemen, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen untuk melaporkan laba sesuai kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba.

Dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kelonggaran (*flexibility principles*) dalam memilih metode

akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kelonggaran ini, perusahaan dapat menghasilkan nilai laba yang berbeda melalui pemilihan metode akuntansi yang berbeda. Praktik seperti ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas laba yang dilaporkan dalam Boediono (2005). Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan adalah dengan menerapkan monitoring melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan dalam Nasution dan Setiawan (2007). Hal ini sekaligus terkait dengan masalah keagenan di mana *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Nasution dan Setiawan (2007) *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

2.1.3 Good Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report, Forum For Corporate Governance in Indonesia*. FCGI (2006) mengambil definisi dari *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:101) yang apabila diterjemahkan adalah:

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Adrian Sutedi (2012:1) definisi *corporate governance* adalah:

“...suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, (2006:27) mengemukakan mengenai *corporate governance* sebagai berikut:

“...*corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif dibanding melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan *stakeholders*”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ekstern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.3.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance tidak bisa dikesampingkan dari *shareholding theory* dimana *shareholding theory* menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari penanaman investasi yang dilakukan.

Adapun definisi *good corporate governance* menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2007:11) adalah sebagai berikut:

“...sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholder's value*) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas”.

Menurut Irham Fahmi (2013:61) *good corporate governance* adalah:

“...suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara lebih jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta menerima sanksi jika aturan-aturan dilanggar”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:101) *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“...suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem atau seperangkat peraturan untuk mengelola perusahaan secara lebih tertata dan terstruktur dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan atau bisa disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

2.1.3.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menteri Negara BUMN mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG menurut Tjager dkk (2003) dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:103). Ada lima prinsip keputusan ini, yaitu:

- a. Kewajaran
Merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya). Hal ini yang memunculkan *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja).
- b. Transparansi
Artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti

bahwa informasi harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

c. Akuntabilitas

Prinsip ini dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.

d. Pertanggungjawaban

Prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggungjawab ada konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.

e. Kemandirian

Artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.

2.1.3.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *good corporate governance* menurut Indra Surya dan Ivan

Yustiavandana dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:106) adalah:

1. “Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum”.

Sedangkan menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* IICG

(2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan

konsep *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya – biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

2.1.3.5 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dan manfaat dari penerapan *good corporate governance* menurut

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:106) adalah:

1. “Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih mudah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum”.

Terdapat enam tujuan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yaitu:

1. “Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional
6. Mensukseskan program privatisasi”.

2.1.3.6 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang didirikan tanggal 2 Juni 2000 adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan IICG adalah melaksanakan riset penerapan GCG yang hasilnya berupa Corporate Governance Perception Index (CGPI). CGPI adalah riset dan pemeringkatan penerapan GCG di perusahaan public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). CGPI diselenggarakan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang. Pada CGPI ini, selain menjalin kerja sama dengan majalah SWA, IICG juga bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG). Tahapan dan bobot penilaian riset dan pemeringkatan CGPI adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Tahapan dan Bobot Penilaian CGPI

No.	Tahapan	Bobot (%)
1.	<i>Self Assesment</i>	15
2.	Kelengkapan Dokumen	25
3.	Makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai sebuah system di perusahaan yang bersangkutan	12
4.	Observasi	48

Sumber: Laporan CGPI, 2008

Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan GCG dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Self-assesment*
Pada tahap ini perusahaan diminta mengisi kuisisioner self assessment seputar penerapan atau implelementasi konsep Corporate Governance di perusahaannya.
- b. Pengumpulan Dokumen Perusahaan.
Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan atau implelementasi Corporate Governance di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaran CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan).
- c. Penyusunan Makalah dan Presentasi
Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.
- d. Observasi
Pada tahap ini tim peneliti CGPI akan berkunjung ke lokasi perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan diatas. Setelah tahapan penilaian selesai, hasil yang diperoleh dibahas dalam Forum Panel ahli untuk menentukan hasil riset dan pemeringkatan. Keputusan panel ahli akan menghasilkan peringkat perusahaan public dan BUMN yang layak diberi penghargaan CGPI Award. Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpecaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skor Penerapan CGPI

Kategori	Nilai
Cukup Terpercaya	55-69
Terpercaya	70-84
Sangat Terpercaya	85-100

Sumber: Laporan CGPI, 2011

Sedangkan cakupan penilaian dalam CGPI adalah sebagai berikut:

1. **Komitmen**
Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai unsur yang terkait visi, misi, tata nilai, moral etika bisnis, etika kerja, etika professional, dan prinsip-prinsip GCG, dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.
2. **Transparansi**
Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai regulasi, visi, misi, dan tata nilai perusahaan dalam menyampaikan informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat, dan tepat waktu dalam rangka pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, yang selaras dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggungjawab dan berkeadilan.
3. **Akuntabilitas**
Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan berbagai kejelasan tugas pokok, fungsi, kewenangan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan efektif dalam rangka system

pengendalian internal perusahaan upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

4. **Responsibilitas**

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, serta memastikan telah melakukan praktik terbaik pada setiap proses bisnis dalam rangka mewujudkan GCG.

5. **Independensi**

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan pengelolaan perusahaan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan secara profesional, berlandaskan integritas dan mampu mengelola konflik kepentingan serta tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipasi lainnya dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

6. **Keadilan**

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direktur untuk memastikan pola perilaku organ dan anggota perusahaan serta perlakuan terhadap seluruh pemangku kepentingan selalu mengutamakan perlakuan yang setara dan wajar dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

7. **Kompetensi**

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk berkomitmen pada perilaku yang profesional, memiliki pengetahuan tentang kode etik dan hukum yang relevan, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek etika ketika dihadapkan dengan situasi yang menantang, mengidentifikasi, dan bertindak berdasarkan tata nilai, serta mempromosikan praktik dan perilaku bisnis yang beretika dan bermartabat.

8. **Kepemimpinan**

Aspek ini menunjukkan kesungguhan dewan Komisaris dan Direksi dalam mengintegrasikan, mendorong, dan menciptakan pola perilaku anggota perusahaan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada tata niali, moral, etika, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

9. **Kemampuan Bekerjasama**

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam bekerjasama menanggapi isu-isu yang dihadapi perusahaan dan mengurangi resiko di setiap tingkatan untuk mendapatkan solusi terbaik, dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

10. **Visi, Misi dan Tata Nilai**

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji kembali visi, mis dan tata nilai agar senantiasa sesuai

dengan tuntutan bisnis dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan

11. Strategi dan Kebijakan

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan direksi untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan serta mengevaluasi berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan serta mengevaluasi berbagai analisis eksternal dan internal selaras dengan tata nilai prinsip-prinsip bisnis yang etikal dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat serta bertanggung jawab secara berkeadilan.

12. Etika

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan, serta mengevaluasi berbagai tata nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

13. Iklim Etikal

Aspek ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam menciptakan suasana kondusif agar para anggota perusahaan bertindak jujur, menepati janji, dan menjunjung tinggi tata nilai dan norma yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

2.1.3.7 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Bayu (2010) mekanisme *good corporate governance* diprosikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain).

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

4. Ukuran Dewan Komisaris

Beiner *et al.* dalam Ujiantho dan Pramuka (2007) menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

5. Komite Audit

Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

2.1.4 Manajemen Laba

2.1.4.1 Pengertian Laba

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:309) mengemukakan laba sebagai berikut:

“...perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut”.

Subramayam dan Wild yang diterjemahkan oleh Dewi Yanti (2010:103) laba (*income* disebut juga *earnings* atau profit) merupakan:

“...ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan”.

Menurut Kuswadi (2005:17) mendefinisikan laba sebagai berikut:

“Laba tidak lain adalah hasil penjualan setelah dikurangi semua biaya yang terjadi. Secara sederhana, laba adalah pendapatan dikurangi seluruh beban/biaya yang dikeluarkan”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba adalah selisih antara seluruh pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang direalisasikan yang timbul dari hasil bersih aktivitas operasi usaha yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

2.1.4.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Theodorus M. Tuanakotta yang diterjemahkan oleh Supriyono (2002:177) mengemukakan jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu :

- a. Laba kotor
Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
- b. Laba dari operasi
Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya.
- c. Laba bersih
Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain.

2.1.4.3 Tujuan Laba

Tujuan pelaporan laba menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:300) adalah sebagai berikut:

1. “Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara
2. Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan
4. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang
5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi

6. Menjadi prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan/divisi
7. Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat”.

2.1.4.4 Pengertian Manajemen Laba

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* (1993) dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earning management is intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya)”.

Menurut Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparini Harapan (2010:81) definisi manajemen laba adalah sebagai berikut:

“...manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya”.

Menurut Irham Fahmi (2013:279) tentang manajemen laba:

“Earnings management (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan yang dikehendaki terutama oleh manajemen perusahaan untuk memperoleh tujuan tertentu.

2.1.4.5 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2008:63):

1. *“Bonus Plan Hypothesis*
Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.
2. *Debt Covenant Hypothesis*
Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi dan cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.
3. *Political Cost Hypothesis*
Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban

pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.”

2.1.4.6 Bentuk/Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2000) dalam Hikmah (2013) terdapat beberapa pola dalam manajemen laba yaitu:

- a. *“Taking a Bath*
Pola ini terjadi pada saat pengangkatan CEO baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.
- b. *Income Minimization*
Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode berikutnya.
- c. *Income Maximization*
Dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.
- d. *Income Smoothing*”.
Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar. Karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

1. “Penaikan Laba (*Income Increasing*)
Pola penaikan laba (*income increasing*), merupakan upaya perusahaan untuk mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan yang sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
2. Penurunan Laba (*Income Decreasing*)
Pola penurunan laba (*income decreasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

3. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Pola perataan laba (*income smoothing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba nya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.”

2.1.4.7 Teknik-teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:34) ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih
Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya.
2. Mencatat pendapatan palsu
Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapan pun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapan pun.
3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat dan lambat
Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya

ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Semakin kecil biaya ini membuat laba periode berjalan akan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan akan seolah-olah lebih baik atau besar bila dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban

Upaya ini dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya.

2.1.4.8 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 216) model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Model Healy, Model De Angelo, Model Jones serta Model Jones dengan Modifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. “Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC_t}{T}$$

Keterangan:

NDA = *Nondiscretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1

T = 1,2, T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: menghitung nilai (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net Income - Cash Flow From Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan :

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t .

TA_{t-1} = Total aktiva periode $t-1$.

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net Income - Cash Flow From Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus diatas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana

terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta, $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}^0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^1 \left[\frac{\Delta REV_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 , dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$NDA_{i,t} = \hat{b}^0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] \Sigma$$

Keterangan :

\hat{b}^0 = Estimated intercept perusahaan i periode t

\hat{b}^1, \hat{b}^2 = Slope untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode t-1

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

4. Model Jones Modifikasi

Model Jones dimodifikasi merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika discretion melebihi pendapatan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan perubahan utang lancar (*current liabilities*) dikurangi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$Current\ Accrual = D\ (Current\ Asset - Cash) - D\ (Current\ Liabilities - Current\ Maturity\ of\ Long\ Term\ Debt)$$

Langkah III: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus diatas terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta, $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, sebagai variabel independennya.

$$\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{a}^1 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{a}^2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu a_1 dan a_2 yang akan dimasukan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$NDA_{i,t} = \hat{a}^1 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{a}^2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan :

$NDA_{i,t}$ = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan i periode t

\hat{a}^1 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

\hat{a}^2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total assets untuk perusahaan i periode t

$\Delta Sales_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t

$\Delta TR_{i,t}$ = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t.

Langkah IV: menghitung nilai *disrectionary current accruals*, yaitu *disrectionary accrual* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DCA_{i,t} = \frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDC A_{i,t}$$

Langkah V: Menghitung nilai *nondisrectionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependennya serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ - dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \hat{b}^0 \left[\frac{1}{TA_{it-1}} \right] + \hat{b}^1 \left[\frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} \right] + \hat{b}^2 \left[\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right] \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$NDTA_{it} = \hat{b}^0 \left[\frac{1}{TA_{it-1}} \right] + \hat{b}^1 \left[\frac{\Delta Sales_{it} - \Delta TR_{it}}{TA_{it-1}} \right] + \hat{b}^2 \left[\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right] \Sigma$$

Keterangan :

\hat{b}^0 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

\hat{b}^1, \hat{b}^2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode t-1

Langkah VI: Menghitung nilai *disrectionary accruals*, *disrectionary long-term accruals* dan *nondisrectionary long-term accruals*. *Disrectionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondisrectionary accruals* (NDTA). *Disrectionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *disrectionary accruals* (DTA) dengan *disrectionary current accruals* (DCA), sedangkan *nondisrectionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondisrectionary accruals* (NDTA) dengan *nondisrectionary current accruals* (NDCA)".

2.1.5 Kualitas Laba

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Laba

Menurut Sutopo (2009) kualitas laba dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kualitas laba adalah laba yang secara benar dan akurat menggambarkan profitabilitas operasional perusahaan”.

Sedangkan menurut Chandrarin (2001) kualitas laba yaitu:

“Kualitas laba juga didefinisikan sebagai perbedaan antara laba bersih yang dilaporkan dalam laba rugi dengan yang sesungguhnya. Laba dikatakan berkualitas ketika laba akuntansi mempunyai sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian di dalamnya, sehingga dapat mencerminkan kinerja perusahaan sesungguhnya”.

Adapun pengertian kualitas laba menurut Schipper dan Vincent (2003)

dalam Umami (2015) menjelaskan bahwa:

“Kualitas laba menunjukkan tingkat kedekatan laba yang dilaporkan dengan *hicksian income*, yang merupakan laba ekonomik yaitu jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laba merupakan laba bersih yang dilaporkan secara benar dan akurat menggambarkan profitabilitas operasional perusahaan dan mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya dalam satu periode tertentu.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba

Jun (2009) dalam Umami (2015) menyatakan bahwa kualitas laba dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Standar Akuntansi

Perbedaan standar akuntansi di suatu perusahaan dapat menyebabkan perbedaan kualitas laba. Webster dan Thornton dalam Umami (2015) menemukan perbedaan kualitas laba yang dapat dilihat dari *discretionary accruals* pada perusahaan yang menganut GAAP dan perusahaan yang menganut IAS.

2) Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas laba adalah komposisi pemegang saham, keberadaan pemegang saham pengendali dan

ukuran perusahaan. Beberapa penelitian menemukan tindakan manajemen laba dapat berkurang pada perusahaan yang memiliki komposisi pemegang institusional yang lebih tinggi.

3) Karakteristik Komisaris dan Komite Audit

Fungsi pengawasan yang melekat pada dewan komisaris mampu meningkatkan kualitas laba dengan cara membatasi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dechow *et all* (2002) dalam Umami (2015) mengungkapkan keberadaan komisaris independen mampu menurunkan praktik manajemen di suatu perusahaan. Sedangkan Vafeas (2005) membuktikan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan positif dengan kualitas laba.

4) Karakteristik Manajerial

Karakteristik manajerial yang dapat mempengaruhi kualitas laba misalnya: kompensasi, reputasi, gender, tingkat perputaran, usia dan sebagainya. Kalyta dan Magnan (2008) dalam Umami (2015) mengungkapkan adanya kompensasi yang berbentuk tunai, rencana bonus maupun program pensiun perusahaan dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba.

2.1.5.3 Manfaat Kualitas Laba

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan merupakan sumber informasi dasar bagi pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Tujuan diterbitkannya laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan penanaman modal investor, pihak kreditur maupun keputusan-keputusan lain yang berhubungan dengan bisnis perusahaan (SFAC No.1).

Hal tersebut mengisyaratkan jika informasi keuangan dalam laporan keuangan merupakan informasi penting yang berpengaruh bagi banyak pihak. Oleh karena itu, informasi keuangan tersebut harus berkualitas tinggi karena informasi keuangan yang berkualitas tinggi akan meminimalkan adanya kesenjangan asimetri

informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan oleh Vafeas (2005) dalam Umami (2015).

Informasi laba juga merupakan komponen yang menarik bagi pihak eksternal perusahaan dalam melakukan penilaian investasi maupun keputusan kerjasama bisnis menurut Schipper dan Vincent (2003) dalam Umami (2015). Para analis keuangan menggunakan informasi laba untuk meramalkan nilai pengembalian investasi di masa yang akan datang. Dewan komisaris dan para pemilik institusional menggunakan informasi laba untuk menilai kinerja perusahaan dan kualitas manajemen perusahaan. Sedangkan para pemegang saham memerlukan informasi laba sebagai dasar penentuan bonus berbasis laba maupun penghargaan kepada para eksekutif perusahaan menurut Peasnell *et al* (2000) dalam Umami (2014). Isu mengenai kualitas laba menjadi penting seiring dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan terhadap informasi laba yang terkandung dalam laporan keuangan. Kualitas laba yang tinggi akan meningkatkan nilai kebermanfaatan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.5.4 Pengukuran Kualitas Laba

Menurut Abdelghany (2015) dalam Ayub (2015), Kualitas laba dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

1. Model Leuz et al (2003)

Leuz et al (2003) mengukur variabilitas laba. Semakin suatu laba stabil (tidak variabel, tidak berubah-ubah) kadang diasosiasikan kualitas laba tersebut lebih baik. Cara mengukurnya adalah dengan mengukur rasio

standar deviasi laba operasi terhadap standar deviasi kas dari hasil operasional. Semakin kecil rasionya, menunjukkan adanya *income smoothing*, sehingga kualitas laba kurang baik.

2. Model Penman (2001)

Model ini merupakan yang paling sederhana. Caranya adalah dengan mengukur rasio kas dari operasi terhadap pendapatan atau penjualan. Semakin besar rasio, maka semakin baik kualitas laba.

3. *Discretionary accruals*

Digunakan juga oleh Balsam et al (2003). Termasuk salah satu yang rumit. Dengan meregresi perubahan total accrual sebagai variabel independen dan perubahan penjualan, perubahan PPE, perubahan total asset, perubahan kas dari operasional sebagai variabel independen. Jika hasilnya adalah signifikan maka terdapat *earning management*, sehingga kualitas laba kurang baik.

Dengan konotasi manajemen laba yang negatif, maka dapat disimpulkan, ketika laba yang disajikan merupakan hasil rekayasa, tentunya kualitasnya lebih rendah, karena laba tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK no. 01) yang menyatakan bahwa laporan keuangan haruslah menyajikan keadaan yang sesungguhnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Para investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen menurut Chung et al (2003) dalam Purwandari (2011). Investor institusional dengan kepemilikan

saham dalam jumlah besar akan mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk mengumpulkan informasi, mengawasi tindakan-tindakan manajemen dan mendorong kinerja yang lebih baik. Bilamana investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah yang relatif rendah, maka para investor institusional hanya memiliki sedikit dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajer. Oleh karena itu, keberadaan investor institusi ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Dalam Fidyati (2004), Shiller dan Pound menjelaskan bahwa investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan monitoring secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer.

Suranta dan Midiastuty (2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi praktik manajemen laba. Investor institusional diasumsikan sebagai investor yang berpengalaman dan dapat melakukan analisa yang lebih baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh manipulasi manajemen, oleh karena itu manajer akan menghindari tindakan manajemen laba sehingga laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Raras Mahiswari dan Paskah Ika Nugroho (2014), dan Ismalia Asward (2015) menyatakan bahwa jumlah kepemilikan saham oleh institusional menunjukkan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga pengawasan yang cukup ketat dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer yang dapat merugikan investor.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Budi Susilo (2010), menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor manajemen laba. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Pandangan berdasarkan *alignment effect* yang mengacu pada kerangka Jensen dan Meckling (1976) dalam Bayu (2010) yang menyatakan bahwa penyatuan kepentingan (*convergence of interest*) antara manajer dan pemilik dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang cenderung sama dengan pemegang saham lainnya. Dengan adanya penyatuan kepentingan tersebut konflik keagenan akan berkurang sehingga manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kemakmuran pemegang saham.

Dalam Febrianto (2005), manajer yang memiliki akses terhadap informasi perusahaan akan memiliki inisiatif untuk memanipulasi informasi tersebut jika mereka merasa informasi tersebut merugikan kepentingan mereka. Namun jika kepentingan manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat. Dengan memperbesar kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang tercermin dari berkurangnya nilai *discretionary accruals*. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan.

Bayu Fatma (2010) dan Ismalia Asward (2015) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel manajemen laba, karena manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba baik dalam bentuk menaikkan laba maupun dengan menurunkan laba demi kepentingannya tersebut. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajerial maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam melakukan manajemen laba. Sedangkan I Dewa Gede (2014) menyatakan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba. Hasil ini membuktikan dengan adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan akan mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak agar lebih berhati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya.

2.2.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab dalam mempekerjakan, melakukan evaluasi dan melakukan pemecatan untuk para manajer puncak menurut KNKG (2006) dalam Bayu (2010). Secara lebih luas tugas komisaris independen adalah mengawasi dewan direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan dalam Alijoyo dkk (2004) dalam Bayu (2010). Manajemen laba pada perusahaan terjadi karena adanya *conflict of interest* yang dimiliki antara agen dan principal. Dalam hal ini komisaris independen dapat meminimalisir *conflict of interest* karena akan bersikap objektif dalam pengambilan keputusan, dimana komisaris independen akan memberi masukan jika terjadi penyimpangan pengelolaan usaha sehingga *adverse selection* dan *moral hazard* dapat dihindari. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Terkait dengan manajemen laba, komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun.

Fama dan Jensen dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan pengarahan kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Secara umum, dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan, maka dewan harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (*outsider*). Beberapa pendapat menyatakan bahwa direktur non-eksekutif diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manajemen yang bertindak *opportunistic*.

Menurut Cornett dalam Ujiantho dan Pramuka (2007), jika anggota dewan komisaris meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya *discretionary accruals*, sehingga diharapkan kualitas laba juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afifa Daljono (2013) dan Ismalia Asward (2015) yang menyatakan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan semakin besar proporsi komisaris independen maka manajemen laba akan semakin berkurang. Sedangkan Bayu Ftama (2010) menyatakan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel manajemen laba. Sebab hal

ini dapat dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal (sementara pemegang saham mayoritas (pengendali/*founders*) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun oleh Gideon (2005) dalam Bayu (2010).

2.2.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Fungsi dewan komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberi nasehat kepada manajer (direksi) atas nama para pemegang saham. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengendalian internal perusahaan memiliki peranan terhadap terhadap aktivitas pengawasan dalam Siallagan dan Machfoedz (2006). Pengawasan oleh dewan komisaris akan menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham maka mereka harus mewakili kepentingan para pemegang saham dalam mengawasi tindakan manajemen.

Yermack dan Jensen (1993) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar, maka semakin kecil kemungkinan terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan dan terhindar dari praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan ukuran dewan komisaris yang besar (dalam hal ini Jensen menyebutkan lebih dari 7 orang) dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai alat monitoring

kegiatan manajemen karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Vafeas dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) mengatakan bahwa selain kepemilikan manajerial, peran dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring laporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris.

Bayu Fatma (2010) menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel manajemen laba. Gideon (2005) menyebutkan bahwa besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi penentu dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Namun, efektivitas pengawasan tergantung bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan.

2.2.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Bayu (2010) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit dalam perusahaan, *discretionary accruals* semakin rendah, yang berarti kualitas laba yang dihasilkan semakin tinggi. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit akan memiliki konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut KNKG dalam Gradiyanto (2012), untuk membangun komite audit yang efektif, rentan jumlah anggota yang diperlukan adalah 3-5 orang. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin.

Bayu Fatma (2010) dan Ismalia Asward (2015) menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, semakin tinggi ukuran komite audit maka semakin rendah kemungkinan manajer dalam melakukan manajemen laba.

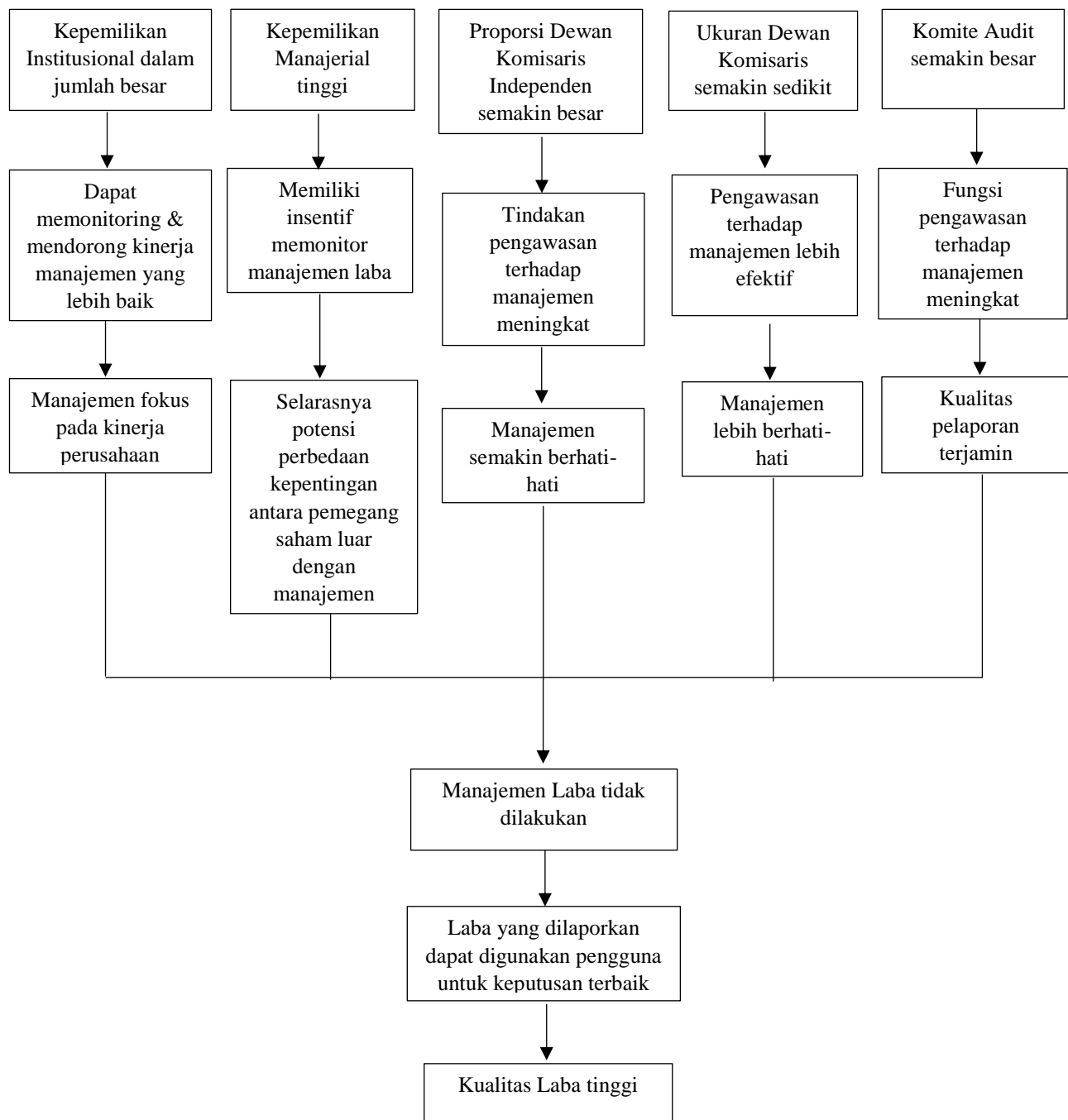
2.2.6 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kualitas Laba

Beberapa teknik manajemen laba (*earnings management*) dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh manajemen. Praktik manajemen laba akan mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. *Earnings* dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila *earnings* yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan yang terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan return saham oleh Bernard dan Stober (1998) dalam Siallagan (2006).

Andri (2007) menyatakan apabila laba yang dilaporkan manajemen erat dengan adanya manajemen laba maka kualitas dari laba tersebut akan buruk atau dengan kata lain hubungan dalam manajemen laba dan kualitas adalah berpengaruh

negatif. Ini sejalan dengan beberapa penelitian lain yang menyatakan manajemen memiliki pengaruh terhadap kualitas laba dalam Siallagan dan Mahfoedz (2006).

Tingginya manajemen laba dapat mengurangi kepercayaan investor dan pihak pihak berkepentingan lain terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan manajemen ini akan memicu tinggi konflik keagenan dalam suatu perusahaan, Tinggi konflik keagenan dapat menimbulkan motivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, semakin tinggi praktik manajemen laba maka akan menyebabkan laba yang dilaporkan tidak berkualitas, atau laba tersebut tidak memiliki kekuatan respon laba (*earnings powers*), hal inilah yang menurunkan kualitas laba suatu perusahaan dalam Venola (2008).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) dalam penelitian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₃: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₄: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₅: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₆: Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.